

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal luas dengan bangsa yang terdiri dari sekitar 3.000 suku bangsa, setiap suku bangsa mengakui dan diakui mempunyai daerah teritorial sendiri. Dalam antropologi, suku bangsa dikenal dengan istilah teknis golongan etnis, dan bangsa yang terdiri dari banyak suku bangsa disebut bangsa multietnis. Menurut estimasi Juli 2003, Penduduk Indonesia berjumlah 234.893.453 orang dan tersebar di 17.000 pulau.¹

Indonesia merupakan salah satu di antara sedikit negara di dunia yang memiliki karakteristik sebagai negara multietnik. Di Indonesia diperkirakan terdapat 931 etnik dengan 731 bahasa. Ada etnis yang besar dan ada yang kecil. Etnis besar di Indonesia antara lain: Jawa, Sunda, Madura, Melayu, Bali, Minangkabau, Batak, Dayak, Bugis, dan Cina. Sebagai negara yang multietnis, tidak hanya bentuk fisik melainkan juga sistem religi, hukum, arsitektur, obat-obatan, makanan, dan kesenian orang Indonesia pun berbeda-beda menurut etnisnya.²

Dengan demikian Indonesia dikenal dengan keistimewaan dari keberagamannya yang berbeda-beda dan mempunyai daya tarik yang tinggi

¹ Yoseph Yapi Taum, Dosen F. Sastra Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, mewakili tokoh masyarakat adat/etnis.

² <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbyogyakarta/2014/07/20/masalah-masalah-sosial-dalam-masyarakat-multietnik/> diakses tanggal 3 november jam 12.16

selain itu juga menjadi suatu identitas bangsa untuk menjaga dan memperkenalkan Indonesia kepada dunia. Perbedaan suku atau etnis biasanya akan dikaitkan atau dibawa ke dalam ranah perpolitikkan. Dominasi etnis mayoritas tidak terpisahkan dari tradisi politik yang ada. Contohnya dengan dilakukannya Pemilu atau sekarang lebih sering disebut Pilgub. Pemilihan kepala daerah adalah sebuah ajang demokrasi untuk mencari pemimpin yang mumpuni dan sah sesuai dengan kehendak “*stake holder*” yakni (masyarakat) yang mempunyai peran dan fungsi penting terhadap pemilihan kepala daerah.

Pemilihan kepala daerah merupakan proses atau program untuk sarana pendidikan politik bagi masyarakat, karena tidak semua kalangan masyarakat paham apa itu politik atau hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan atau ketatanegaraan dan dengan secara tidak langsung dalam proses pemilihan kepala daerah, masyarakat langsung terjamah dengan melakukan pemilihan terhadap pemimpin daerah yang dirasa mumpuni oleh setiap individu masyarakat. Sejatinya pemilihan kepala daerah adalah sarana pendidikan politik bagi masyarakat agar dapat mengetahui bagaimana memilih pemimpin. Pemimpin diharapkan selain kharismatik juga harus mempunyai kecakapan, kemampuan, integritas, pengetahuan kepemimpinan, moralitas yang tinggi dan bertanggung jawab.³

³ H.A.W, Wijaya. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia : Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 tentang pemerintahan daerah* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007), hal 126.

Dinamika politik yang terjadi di Indonesia diawali dengan runtuhnya orde baru yang otoriter berubah menjadi sistem politik demokratis. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Otonomi Daerah) Pasal 56, Pasal 119 dan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang membuka peluang seluas-luasnya kepada rakyat untuk mewujudkan aspirasi daerah dengan memiliki pemimpin lokal yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan kepala daerah secara langsung.

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah diatur melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Otonomi Daerah).

Pasal 1 Ayat 5 yang menyebutkan Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 Ayat 6 Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/Pred.Kab/6/1967 tanggal 28 Juni 1967. Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera itu, dahulu mengatur bahwa istilah Tjina digunakan untuk mengganti istilah Tiongkok/Tionghoa. Tentang perubahan nama atau istilah “Tjina/China/Cina” menjadi “Tiongkok/Tionghoa” guna untuk menghindari atau meredam dampak diskriminatif terhadap masyarakat Tionghoa. Meski Keputusan Presiden ini

dibuat masih baru, tapi ini adalah bagian pembuktian bahwa tidak ada perbedaan berdasarkan etnis atau suku.

Sebagai penduduk minoritas, masyarakat etnis Tionghoa mulai mampu beradaptasi dengan tidak menutup diri dalam hal bersosialisasi terhadap lingkungan baru dan penduduk asli. Di Belitung sendiri masyarakat etnis Tionghoa memberi sedikit jati dirinya untuk dapat setara dengan masyarakat lain dengan merubah nama dengan menggunakan nama Indonesia. Meski demikian mereka tetap memegang kental nama asli dari etnis mereka seperti nama marga asli mereka secara turun temurun yang membuktikan mereka tidak melepas jati diri mereka yang asli dan tetap konsisten dengan nama Indonesia sebagai pelengkap identitas menjadi warga negara Indonesia.

Masuknya keturunan etnis Tionghoa di Pulau Belitung tidak terlepas dari sejarah pada masa pendudukan Belanda-Jepang. Pada abad ke-17, Pulau Belitung menjadi jalur perdagangan dan merupakan tempat persinggahan kaum pedagang. Dari sekian banyak pedagang, yang paling berpengaruh adalah pedagang Cina dan Arab. Hal ini dapat dibuktikan dari tembikar-tembikar yang berasal dari Wangsa Ming abad ke-14 hingga ke-17, yang banyak ditemukan dalam lapisan-lapisan tambang timah di daerah Kepenai, Buding dan Kelapa Kampit. Pedagang-pedagang Cina tersebut masuk ke Pulau Belitung kira-kira tahun 1293. Hal ini berdasarkan catatan dari seorang sejarawan Cina bernama Fei Hsin tahun 1436. Sedangkan orang Cina mengenal Belitung disebabkan pada tahun 1293, sebuah armada Cina dibawah

pimpinan Shi Pi, Ike Mise dan Khau Hsing yang sedang mengadakan perjalanan ke Pulau Jawa terdampar di perairan Belitung.⁴

Kisah lainnya tertulis dalam catatan sejarah PT. Timah, dimana etnis Tionghoa yang sengaja didatangkan langsung dari Daratan Cina, Canton, yang dijadikan sebagai kuli tambang timah di pulau Bangka.⁵ Untuk itu dibentuk perusahaan *Holland China Handels Compagnie* yang bertugas mendatangkan tenaga kuli langsung dari Cina. Mereka didatangkan dengan kapal dari pelabuhan-pelabuhan: *Pak Hoi, Hongkong Haibo dan Swato*.⁶

Masuknya etnis Tionghoa merupakan sejarah yang berkaitan dengan kondisi wilayah atau sumber daya alam di tanah Belitung yang kaya akan hasil alam yaitu “Timah”. Mereka sengaja didatangkan sebagai kuli tambang timah dan dipekerjakan untuk beberapa PT tambang yang sudah banyak tersebar di Belitung. Dengan melalui banyak proses, alasan dan kejadian mereka akhirnya banyak yang memilih menetap di Pulau Belitung dan banyak diantara mereka berjodoh dengan penduduk asli Pulau Belitung dan memiliki keturunan.

Selain etnis Tionghoa penulis akan membahas masuknya suku melayu di Pulau Belitung. Belitung diperkirakan berasal dari daratan Malaka (Melayu), yang datang ke pulau Belitung pada abad ke-18. Sebelum kedatangan bangsa Melayu, pulau Belitung dahulunya dianggap kosong tidak berpenghuni.

⁴ <http://portal.belitungkab.go.id/sejarah-belitung> diakses pada tanggal 6 november jam 15.45

⁵ Sujitno, Sutejdo. *Sejarah Penambangan Timah Di Indonesia (Abad Ke 18 – Abad Ke 20) Sekitar Sejarah perkembangan teknologi dan pengelolaan penambangan timah di Indonesia* (Jakarta: PT Tambang Timah, 2007), hlm 53.

⁶ *Ibid*, hlm 68.

Tetapi, sejumlah teori menyebutkan bahwa sebelum hadirnya masyarakat Melayu di pulau Belitung, terdapat “suku asli” yang mendiami pulau itu, yang disebut suku Ameng Sewang. Segera setelah kedatangan bangsa Melayu, tradisi dan budaya Melayu berkembang, dan hari ini menjadi budaya mayoritas di pulau Belitung. Orang Belitung sendiri menyebut diri mereka “uang Belitung”.⁷

Tampaknya, pemerintah daerah Babel ingin menggiring dan mengukuhkan masyarakat Babel menjadi masyarakat Melayu. Seiring dengan pembentukan provinsi pada 21 November 2001 lalu, beberapa anggota presidium pembentukan provinsi mulai memperkenalkan ‘telok belanga’ sebagai pakaian khas Bangka. Pakaian ini lazim dipakai di Malaysia dan merupakan pakaian resmi.⁸

Pada pelantikan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, anggota DPRD, tokoh masyarakat, alim ulama, serta undangan lainnya mengenakan telok belanga. Ketua DPRD Provinsi Babel memandang pelantikan ini sebagai sebuah momentum untuk menemukan kembali jati diri masyarakat Babel yang merupakan bagian dari rentang tanah Melayu.⁹

⁷ <http://www.wacananusantara.org/suku-belitung/> diakses pada tanggal 20 november 2015 pukul 12.19

⁸ Pakaian ini merupakan pakaian khas Melayu seperti yang sering digunakan pada acara resmi di Malaysia. Perangkat pakaian ini meliputi celana dan kemeja lengan panjang yang tak memiliki kerah, sarung, dan kopiah hitam. Di Indonesia, pakaian ini sering dipakai pada acara keagamaan (Islam).

⁹ Nurhayat Arif Permana. 2002. *Revitalisasi Lembaga Adat dalam Menyelesaikan Konflik Etnis Menghadapi Otonomi Daerah: Studi Kasus Pulau Bangka*. Antropologi Indonesia 68. Halm79

Pada saat itu pula, beberapa tokoh masyarakat Bangka mendirikan Palbatu (Persaudaraan Lencang Melayu Bersatu) sebagai sebuah lembaga swadaya masyarakat yang menjembatani hubungan bilateral antara Bangka-Malaysia sebagai satu rumpun Melayu. Aktivitas Palbatu dimulai dari aktivitas budaya, yakni melalui kesenian hingga perekonomian. Walikota Pangkalpinang dan Walikota Melaka berkeinginan menjadikan Pangkalpinang dan Melaka sebagai ‘Kota Kembar’ (Twin Cities).¹⁰

Sebagai usaha untuk ‘memelayukan’ Babel, pemangku adat Bangka telah memberikan gelar ‘Datuk’ kepada Ketua DPRD, Gubernur, dan Direktur Utama PT Timah. Pemberian gelar ini menimbulkan perdebatan dan polemik di media massa, karena menurut beberapa sesepuh adat di Bangka, tidak ada gelar Datuk dalam sejarah kemelayuan Bangka.¹¹

¹⁰ Pada tanggal 17 April 2002 diselenggarakan ‘2nd International Convention and Exposition Twin Cities’ di Melaka, Malaysia. Di kota itu juga dilakukan Festival Gendang Melaka Nusantara V di Melaka, Malaysia, pada tanggal 12–16 April 2002.

¹¹ Gelar ‘Datuk’ diberikan pemangku adat Bangka Romawi Latif kepada Gubernur Babel, yaitu gelar Datuk Raje Mude Angin, Ketua DPRD Babel Emron Pangkapi sebagai Datuk Sungai Menduk, dan Direktur PT Tobroni Alwi. Namun pemangku adat Bangka, Romawi Latif, membantah telah memberikan gelar. Menurutnya, dia hanya diam—tidak mengiyakan dan tidak menolak—ketika seorang tokoh pemuda memberikan penjelasan kepada wartawan. Kata ‘datuk’ menurutnya bukan gelar, tetapi kata sapaan dalam adat istiadat berbahasa Melayu yang sopan dan beradab.

Tabel 1.1 Nama Pasangan Calon, Etnis, Partai Pengusung, dan Perolehan Suara

No	Nama Pasangan Calon	Etnis	Partai Pengusung	Perolehan Suara
1.	Telie Gozalie. SE - Taufik Rizani. Amd dengan Jargon "PASTI"	Tionghoa – Melayu	PDI-P dan PKB.	27.026
2.	Andi Saparudin Lanna. SH - Junaidi M Tamin dengan Jargon "LAJU"	Melayu - Melayu	PDK, PKBIB, PNBKI ,Barnas, PPRN, PNIM, PPDI, PBR dan Partai Buruh	9.989
3.	dr. Wiryati Husein - Suharyanto. BA dengan Jargon "KB"	Melayu - Melayu	Demokrat, PAN dan PKPI	7.514
4.	Junaidi Haminte – Harsono dengan Jargon "Tekad JH"	Melayu – Melayu	Gerindra, PKS dan PDP	3.285
5.	H. Sahani Saleh. S. Sos - H. Erwandi dengan Jargo "BESAER"	Melayu – Melayu	Partai Golkar dan Partai Hanura.	27.186
6.	Yuslih Ihza Mahendra - H. Abdullah Ma'ruf dengan Jargon LLILLAH	Melayu – Melayu	PBB dan PPP	9.591

Sumber : KPUD Belitung Barat

Pada Pemilu pada Belitung tahun 2013 terdapat dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dibanding dengan empat pasangan calon yang lain kedua pasangan calon dengan suara terbanyak memperoleh selisih yang sangat tipis. Pada pasangan nomor urut 1, ialah Tellie Gozalie, Tellie lahir di Tanjungpandan, tanggal 10 Desember 1970 merupakan Senator DPD RI perwakilan Provinsi Bangka Belitung periode tahun 2009-2014 dan tahun 2014-2019 setelah berhasil mendapatkan suara sebesar 27.026 suara. Tellie dikenal sebagai seorang Wiraswasta yang aktif di beberapa organisasi seperti PSMT Pusat sebagai Penasehat, INTI Pusat sebagai Penasehat, dan KONI Kabupaten Belitung sebagai Penasehat. Karir sekarang Anggota DPD RI dapil Bangka Belitung 2014-2019.¹²

Dan berikut ialah Taufik Rizani sebagai pendamping Tellie Gozalie, yang lahir pada tanggal 2 Januari 1972 di desa Aik Rayak kecamatan Tanjungpandan, pernah menjalani pendidikan Akademi Maritim Kota Semarang yang pada saat itu Taufik belum menyelesaikan studinya, dia sudah diterima bekerja di perusahaan ekspedisi terbesar kota Semarang kala itu. Karirnya menanjak dan menduduki jabatan direktur pada perusahaan tersebut. Runtuh orde baru 1998 dia melepas jabatannya dan untuk pertama kalinya terpilih menjadi wakil rakyat pada tahun 2004 sebagai ketua komisi III DPRD Kabupaten Belitung. Kemudian kembali terpilih tahun 2009 masih sebagai

¹² <http://profil.merdeka.com/indonesia/t/tellie-gozalie/> diakses tanggal 20 november jam 16.12

ketua komisi II DPRD Kabupaten Belitung. Dan terpilih kembali menjadi ketua DPRD untuk periode 2013-2018.¹³

Kemudian pasangan berikut yang sekaligus menjadi pemenang hasil suara dan mengalahkan enam calon pasangan yang lain yakni, pasangan “Besaer” H. Sahani Saleh, S.Sos, lahir di Belitung pada 7 november 1958 beragama Islam, pernah menjalani pendidikan di APMD Yogyakarta, Universitas Jakarta, Jakarta dan pernah berkarir awal menjadi Camat Selat Nasik (2005-2008), Camat Sijuk (2005-2008), Kabag Tata Pemerintahan Setda (2008), Wakil Bupati (2008-20013) dan sekarang menjabat sebagai Bupati Belitung Periode 2014-2019.¹⁴

Berikut Erwandi A.Rani ialah Wakil Bupati Belitung kelahiran Sijuk 13 Oktober 1959 yang lahir dari keluarga Guru yang berpenghasilan minim. Setelah menamatkan pendidikan wajib 9 tahun, Erwandi melanjutkan pendidikan ke IKIP Jakarta dan diterima bekerja di Lab School IKIP untuk mengajar. Pada tahun 2003 terjadi pemekaran di Belitung dan beliau diajak untuk membenahi Belitung Timur, karirnya mulai menanjak dari bekerja di Dinas, menjadi Kabag TU Dinas, Kepala Dinas, Asisten Bupati, Sekda Kabupaten Belitung Timur dan akhirnya pada suatu kesempatan beliau

¹³ <http://portal.belitungkab.go.id/read-artikel/74/menyusur-jejak-ketua-dprd-kabupaten-belitung-taufik-rizaniamd> diakses tgl 4 desember 2015 (12.32)

¹⁴ <http://portal.belitungkab.go.id/profil-bupati> diakses tgl 4 desember 2015 (12.42)

dipinang untuk menjadi pasangan bersama Sahani Saleh dan akhirnya hingga saat ini masih menjabat sebagai Wakil Bupati.¹⁵

Perolehan suara paling besar yakni Pasangan nomor urut 1 Tellie Gozellie-Taufik Rizani (PasTTi) dan nomor urut 5 Sahani Saleh-Erwandi A.Rani (Besaer), pasangan Besaer ini berhasil unggul dengan selisih 160 suara atau sekitar 0,2 persen dari perolehan suara Pasangan PasTTi dan hasil pemilukada kali ini adalah yang tertipis sepanjang sejarah Babel.¹⁶

Tahapan pemilukada berdampak dengan hubungan relasi sosial dimasyarakat dengan ragam etnisnya, banyak menimbulkan pro dan kontra di berbagai pihak. Pemilukada tahun 2013 menghasilkan suara berbanding tipis antara dua calon terkuat dari pasangan Tionghoa dan Melayu. Perbedaan 0,2 persen menyulut permasalahan terhadap minat pilih masyarakat Belitung yang juga banyak menaruh pilihannya terhadap pasangan nomor urut 01 (Tionghoa & Melayu) yang sebenarnya Belitung didominasi oleh penduduk Melayu sebanyak 75% juga tidak kalah terbesar kedua dari 20% penduduk Tionghoa dan sisa lainnya merupakan penduduk campuran.

Adanya calon dari Tionghoa ini berimbas terhadap relasi masyarakat, bagaimana sikap masyarakat terhadap calon atau nama baru yang berasal dari etnis Tionghoa. Masyarakat/penduduk etnis Tionghoa jarang sekali atau

¹⁵ <http://portal.belitungkab.go.id/read-artikel/72/secangkir-kopi-bersama-sang-guru-bincang-akrab-bersama-wakil-bupati-belitung-drs-h-erwandi-a-rani> diakses tanggal 4 Desember 2015 (12.57)

¹⁶ <http://bangka.tribunnews.com/2013/10/15/agustin-selisih-suara-pemilukada-belitung-tipis> diakses tanggal 4 Desember 2015 13.34

bahkan belum pernah melibatkan diri mereka terhadap kinerja pemerintahan maupun membangun daerah di Belitung dan pada tahun ini salah satu dari perwakilan mereka muncul untuk ikut serta terhadap pemilihan politik. Hal ini memberi gairah baru terhadap seluruh penduduk Belitung, melihat bagaimana dua etnis terbesar di Belitung bersaing mencapai kedudukan. Karena hal ini muncul relasi sosial yang berbeda dari kehidupan sehari-hari biasanya. Isu-isu, pro/kontra, dan ketegangan lainnya bermunculan. Inilah mengapa diangkat sebuah permasalahan untuk diketahui sebagai bahan penelitian pada skripsi ini.

Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“RELASI ANTAR ETNIS TIONGHOA DAN MELAYU DALAM PEMILUKADA TAHUN 2013 DI TANJUNG PANDAN, BELITUNG**. Keselarasan atau hubungan sosial antara dua etnis ini akan mempengaruhi kondisi perpolitikan daerah Belitung terutama dalam Pemiluakada.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana relasi antar etnis Tionghoa dan Melayu dalam Pemiluakada Tahun 2013 di Tanjung Pandan, Belitung?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh etnis Tionghoa dan Melayu dalam Pemiluakada Tahun 2013 di Tanjung Pandan, Belitung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui relasi antar etnis Tionghoa dan Melayu dalam Pemilu pada Tahun 2013 di Tanjung Pandan, Belitung.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam Pemilu pada Tahun 2013 di Tanjung Pandan, Belitung.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya terutama tentang Politik etnis dalam Pemilu pada di Daerah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Partai politik, elite politik maupun masyarakat untuk menjaga keselarasan dalam Pemilu pada di Daerah. Selain itu diharapkan penelitian ini akan mendapatkan sebuah informasi tentang sejauh mana pilihan politik dan keselarasan antara etnis politik.

E. Kerangka Teori

1. Relasi Sosial

a. Pengertian Relasi Sosial

Pengertian Relasi Sosial, Hubungan antar sesama dalam istilah sosiologi disebut relasi atau *relation*. Relasi sosial juga disebut hubungan sosial yang merupakan hasil dari interaksi (rangkaian tingkah laku) yang

sistematik antara dua orang atau lebih. Hubungan dalam relasi sosial merupakan hubungan yang sifatnya timbal balik antar individu yang satu dengan individu yang lain dan saling mempengaruhi.

Beberapa tahapan terjadinya relasi sosial yaitu :

- (a) *Zero contact* yaitu kondisi dimana tidak terjadi hubungan antara dua orang;
- (b) *Awareness* yaitu seseorang sudah mulai menyadari kehadiran orang lain;
- (c) *Surface contact* yaitu orang pertama menyadari adanya aktivitas yang sama oleh seseorang di sekitarnya; dan
- (d) *Mutuality* yaitu sudah mulai terjalin relasi sosial antara 2 orang yang tadinya saling asing.¹⁷

Relasi sosial juga disebut hubungan sosial merupakan hasil dari interaksi (rangkaiian tingkah laku) yang sistematik antara dua orang atau lebih. Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa relasi sosial merupakan hubungan timbal balik antar organisasi dengan individu yang lain atau masyarakat dan saling mempengaruhi.¹⁸ Hal ini sangat berhubungan dengan kegiatan *Public Relations* bahwa pada hakikatnya

¹⁷ Hidayati, D.S. 2014. "Peningkatan Relasi Sosial melalui *Social Skill Therapy* pada Penderita *Schizophrenia Katatonik*". *Jurnal Online Psikologi*, 2 (1): 17-28.

¹⁸ Astuti, S. 2012. "Pola Relasi Sosial dengan Buruh Tani dalam Produksi Pertanian". *Skripsi*, Medan: Universitas Sumatera Utara.

Public Relations memiliki ciri-ciri yaitu *two way communications* atau komunikasi timbal balik.¹⁹

Menurut Spradley dan McCurdy dalam Ramadhan, relasi sosial atau hubungan sosial yang terjalin antara individu yang berlangsung dalam waktu yang relatif lama akan membentuk suatu pola, pola hubungan ini juga disebut sebagai pola relasi sosial.²⁰

Manusia ditakdirkan sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk pribadi, manusia berusaha mencukupi semua kebutuhannya untuk kelangsungan hidupnya. Dalam memenuhi kebutuhannya manusia tidak mampu berusaha sendiri, mereka membutuhkan orang lain. Itulah sebabnya manusia perlu berelasi atau berhubungan dengan orang lain sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial dalam rangka menjalani kehidupannya selalu melakukan relasi yang melibatkan dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu. Hubungan sosial merupakan interaksi sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antar individu, antar kelompok, ataupun antara individu dengan kelompok. Hubungan sosial atau relasi sosial merupakan hubungan timbal balik antar individu yang satu dengan individu yang lain, saling mempengaruhi dan didasarkan pada kesadaran untuk saling menolong. Relasi sosial merupakan proses mempengaruhi diantara dua orang atau lebih.

¹⁹ Soemirat, S dan Elvinaro, A. 2010. *Dasar-dasar Public Relation*. Bandung: Rosdakarya

²⁰ Spradley dan McCurdy, 1975 dalam Ramadhan, 2009 : 11

Relasi sosial yakni sama halnya dengan interaksi sosial dan pada tindakannya interaksi sosial yang sesungguhnya terjadi adalah hubungan insan yang bermakna. Melalui hubungan itu berlangsung kontak makna-makna yang diresponi kedua belah pihak. Makna-makna dikomunikasikan dalam simbol-simbol. Misalnya rasa senang akan diungkapkan dengan senyum, jabat tangan, dan tindakan positif lainnya sebagai tambahan rangsangan panca indera atau rangsangan pengertian penuh.

Hendro Puspito menyatakan bahwa pada umumnya para ahli sosiologi mengklasifikasikan bentuk dan pola interaksi sosial menjadi dua, yaitu proses sosial yang bersifat menggabungkan (*associative processes*) dan proses sosial yang menceraikan (*dissociative processes*). Proses sosial yang mengarah ditujukan bagi terwujudnya nilai-nilai yang disebut kebajikan-kebajikan sosial seperti keadilan sosial, cinta kasih, kerukunan, solidaritas dan dikatakan sebagai proses positif. Sedangkan proses sosial menceraikan mengarah kepada terciptanya nilai-nilai negatif atau asosial seperti kebencian, permusuhan, egoisme, kesombongan, pertentangan, perpecahan dan ini dikatakan proses negatif.

b. Bentuk Relasi Sosial (Proses Sosial)

Bentuk-bentuk proses sosial asosiatif adalah:

- 1) Kerja sama, ialah suatu bentuk proses sosial dimana dua atau lebih perorangan atau kelompok mengadakan kegiatan bersama guna

mencapai tujuan yang sama. Bentuk ini paling umum terdapat di antara masyarakat untuk mencapai dan meningkatkan prestasi material maupun non material.

- 2) Asimilasi, ialah berasal dari kata latin *assimilare* yang artinya menjadi sama. Definisi sosiologisnya adalah suatu bentuk proses sosial dimana dua atau lebih individu atau kelompok saling menerima pola kelakuan masing-masing sehingga akhirnya menjadi satu kelompok yang terpadu. Mereka memasuki proses baru menuju penciptaan satu pola kebudayaan sebagai landasan tunggal untuk hidup bersama.
- 3) Akomodasi, berasal dari kata latin *acomodare* yang berarti menyesuaikan. Definisi sosiologisnya adalah suatu bentuk proses sosial yang di dalamnya dua atau lebih individu atau kelompok berusaha untuk tidak saling mengganggu dengan cara mencegah, mengurangi atau menghentikan ketegangan yang akan timbul atau yang sudah ada. Akomodasi ada dua bentuk yaitu toleransi dan kompromi. Bila pihak-pihak yang terlibat dalam proses ini bersedia menanggung derita akibat kelemahan yang dibuat masing-masing. Bila masing-masing pihak mau memberikan konsesi kepada pihak lain yang berarti mau melepaskan sebagian tuntutan yang semula dipertahankan sehingga ketegangan menjadi kendor disebut kompromi.

Bentuk-bentuk disosiatif terdiri dari:

- 1) Persaingan, adalah bentuk proses sosial dimana satu atau lebih individu atau kelompok berusaha mencapai tujuan bersama dengan cara yang lebih cepat dan mutu yang lebih tinggi. Dengan adanya persaingan itu, masyarakat mengadakan seleksi untuk mencapai kemajuan.
- 2) Penghalang (oposisi), berasal dari bahasa latin *opponere* yang artinya menempatkan sesuatu atau seseorang dengan maksud permusuhan. Oposisi adalah proses sosial dimana seseorang atau sekelompok orang berusaha menghalangi pihak lain mencapai tujuannya.
- 3) Konflik, berasal dari bahasa latin *confligere* yang berarti saling memukul. Konflik berarti suatu proses dimana orang atau kelompok berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya.²¹

2. Politik Identitas Etnis

Politik identitas sendiri merupakan konsep baru dalam kajian ilmu politik. Politik identitas adalah nama lain dari biopolitik dan politik perbedaan. Biopolitik mendasarkan diri pada perbedaan-perbedaan yang timbul dari perbedaan tubuh. Dalam filsafat, sebenarnya wacana ini sudah lama muncul, namun penerapannya dalam kajian ilmu politik mengemukakan setelah disimposiumkan pada suatu pertemuan

²¹ Puspito, Hendro. 1992. *Sosiologi Agama*. Yogyakarta: Kanisius.

internasional Asosiasi Ilmuwan Politik Internasional di Wina pada 1994. Pertemuan tersebut menghasilkan konsepsi tentang dasar-dasar praktik politik identitas dan menjadikannya sebagai kajian dalam bidang ilmu politik. Agnes Heller mengambil definisi politik identitas sebagai konsep dan gerakan politik yang fokus perhatiannya adalah perbedaan (*difference*) sebagai suatu kategori politik yang utama. Setelah kegagalan narasi besar (*grand narrative*), ide perbedaan telah menjanjikan suatu kebebasan bermain (*free play*), meskipun kemudian ancaman baru muncul. Politik perbedaan menjadi suatu nama baru dari politik identitas; rasisme (*race thinking*), biofeminisme, dan perselisihan etnis menduduki tempat yang terlarang oleh gagasan besar lama. Berbagai baru intoleransi, praktik-praktik kekerasan, pun muncul.

Klaus Von Beyme menganalisis karakter gerakan politik identitas dalam beberapa tahap perkembangannya, mulai dari tahap pramodern sampai dengan postmodern. Tahap pertama ialah gerakan politik pramodern. Perpecahan fundamental, kelompok-kelompok kesukuan, dan kebangsaan memunculkan gerakan sosial politik yang menyeluruh. Dalam hal ini mobilisasi secara ideologis diprakarsai oleh para pemimpin. Tujuannya adalah perampasan dan perebutan kekuasaan dari suatu penguasa ke penguasa yang baru.

Pada tahap modern, gerakan tersebut muncul dengan adanya pendekatan kondisional, keterpecahan membutuhkan sumber-sumber

untuk dimobilisasi. Terjadi keseimbangan mobilisasi dari atas dan partisipasi dari bawah, peran pemimpin tidak lagi dominan dan tujuan akhirnya adalah pembagian kekuasaan.

Kemudian, pada perkembangannya postmodern, munculnya gerakan itu berasal dari dinamikanya sendiri, protes muncul atas berbagai macam kesempatan individual, tidak ada satu kelompok atau pecahan yang dominan. Pola aksi dan kegiatannya berdasarkan kesadaran diri yang bersifat otonomi sebagai tujuan akhirnya.

Politik identitas etnis dalam perkembangannya dewasa ini lebih banyak menampilkan diri dalam wacana politik kebudayaan. Politik identitas sendiri merupakan proses yang lahir dari kegagalan modernitas untuk memenuhi janjinya. Modernitas kemudian memunculkan gerakan baru wacana kebudayaan, yakni postmodern. Peter Gyorgy mengemukakan bahwa biopolitik secara jelas merupakan kesan atas teknologi politik dalam mengontrol tubuh. Era yang mengikuti disintegrasi semua harapan sampai pada kontrak antara tubuh dan jiwa dapat digambarkan sebagai era baru dalam sejarah kebudayaan (postmodern). Agnes Heller menguatkan hal ini, bahwa politik identitas sendiri merupakan milik dari budaya massa dan erat kaitannya dengan revolusi kebudayaan yang terjadi pada era postmodern. Dengan demikian, politik identitas juga bisa dikategorikan dalam politik kebudayaan.

Postmodernitas sendiri merupakan suatu bentuk politik. Seperti diungkapkan oleh Michael Dear, sikap kedudukan atas nama postmodernitas dalam kebudayaan, baik bentuk apologi maupun stigmatisasi, pada suatu ketika dan pada waktu yang sama, secara eksplisit maupun implisit merupakan sikap mental politik atas kapitalisme multinasional. Politik identitas dalam konteks ini mempunyai nama lain yang selaras, yaitu politik perbedaan (*politic of difference*). Situasi postmodernitas adalah situasi keterserakan, keanekaragaman entitas-entitas perbedaan. Politik kebudayaan dalam situasi ini adalah perjuangan kelompok-kelompok budaya marginal (pinggiran) sebagai akibat banjir budaya kapitalisme untuk mengeksistensi diri. Pada perkembangan ini politik etnis, yang tampil dalam corak kebudayaannya, senantiasa menampilkan diri dan mencoba bertahan bereksistensi.

Dalam situasi keterserakan identitas dan entitas-entitas perbedaan, politik perbedaan sangat subur dalam situasi negara atau masyarakat yang multikultural dan multietnis. Dalam kerangka ini, hubungan interaktif antarkelompok perbedaan, terutama kelompok etnis yang berbeda-beda harus menjalin suatu kerangka etis, dalam hal ini adalah sikap toleran. Toleransi politik hanya mungkin dalam suasana politik negara yang demokratis. Oleh karena toleransi politik (*political tolerance*) sangat dipengaruhi oleh sistem, struktur dan atmosfer politik yang berlaku.

Politik identitas merupakan wacana baru dalam kajian ilmu politik. Secara singkat, politik identitas adalah politik yang fokus utama kajian dan permasalahannya menyangkut perbedaan-perbedaan yang didasarkan atas aumsi-asumsi fisik tubuh seperti persoalan politik yang dimunculkan akibat problematika jender, feminisme dan maskulinisme, persoalan politik etnis yang secara dasariah berbeda fisik dan karakter fisiologis, dan pertentangan-pertentangan yang dimunculkannya, atau persoalan-persoalan politik karena perbedaan agama dan kepercayaan dan bahasa.

Konsep politik identitas relevan untuk diterapkan, paling tidak diwacanakan mengingat peta politik masa depan, yang berkembang ke arah politik yang beragam, lebih melihat kembali pada tataran humanitas dan etik. Geoff Mulgan, seorang ilmuwan politik, mengemukakan bahwa peran-peran etis dan moral harus dikedepankan. Oleh karena seiring runtuhnya narasi besar, ideologi-ideologi besar, partai-partai politik berkurang perannya. Moralitas pun akan lebih dibutuhkan untuk mengatasi gejala-gejala politik dan menumbuhkan perilaku politik yang etis dan bermoral.

Penyikapan terhadap pluralitas politik etnis dan multikulturalisme dapat pula diartikan sebagai pembicaraan tentang multikulturalisme di Indonesia yang notabene secara faktual merupakan negara yang pluralistik, beragam budaya, kaya bahasa, banyak etnis, sebagaimana yang termaktub

secara simbolis pada lambang negara dan dasar filosofis kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika.²²

3. Pemilukada

a. Pengertian Pemilukada

Dinamika politik yang terjadi di Indonesia diawali dengan runtuhnya orde baru yang otoriter berubah menjadi sistem politik demokratis. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Otonomi Daerah) Pasal 56, Pasal 119 dan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung telah menjadi bagian tidak terpisahkan dalam pembangunan demokrasi di Indonesia. Konsolidasi demokrasi di tingkat lokal diyakini menjadi bagian yang krusial dalam mewujudkan konsolidasi tingkat nasional secara lebih kokoh dan demokratis. Dan pasca-dimasukannya Pilkada sebagai bagian dari rezim Pemilu, yang selanjutnya dikenal dengan Pemilukada, kembali menguatkan peran dan fungsinya sebagai bagian pokok proses demokratisasi di Indonesia.²³

²² Abdillah, Ubed. 2002. *Politik Identitas Etnis: Pergaulan Tanda Tanpa Identitas*. Magelang: Transmedia Pustaka, hal 11-25.

²³Tim Peneliti Perludem. 2011. *Menata Kembali Pengaturan Pemilukada*. Jakarta: IFES

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah diatur melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Otonomi Daerah).

Pasal 1 Ayat 5 yang menyebutkan Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 Ayat 6 Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari sudut pandang teori, pemilihan umum adalah sarana sekaligus instrumen terpenting bagi demokratisasi. Bagaimanapun, perwujudan demokrasi akan dapat dirasakan secara riil oleh masyarakat ketika proses pemilihan umum diselenggarakan dalam rangka menentukan kandidat pemimpin yang layak memegang tampuk kekuasaan. Tanpa langkah itu, maka kebenaran demokrasi sebagai sarana dalam mewujudkan kedaulatan rakyat masih akan mengundang sejumlah persoalan tersendiri yang kemudian membuka ruang bagi kemunculan gugatan legitimasi pemerintahan yang berkuasa. Dalam tataran yang lebih sederhana, pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah ditanah air adalah bagian dari langkah mewujudkan agenda demokrasi secara menyeluruh. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang saat ini digelar secara langsung di Indonesia adalah salah satu perwujudan komitmen negara demokrasi sebagaimana yang telah digariskan dalam konstitusi. Dengan proses demokrasi di

tingkat lokal, maka diharapkan agar keterpilihan para pemimpin di daerah juga mencerminkan aspirasi rakyat yang sesungguhnya.²⁴

Pemilihan umum kepala daerah adalah pemilihan umum yang diselenggarakan ditingkat lokal. Oleh karenanya, makna dan tujuan pelaksanaan pemilukada tidak ada bedanya dengan makna dan tujuan pelaksanaan pemilu pada umumnya. Hanya kalau pemilu sering dimaknai dalam artian yang lebih luas dengan cakupan nasional, pemilukada merupakan pelaksanaan pemilu ditingkat daerah dalam rangka memilih pemimpin di daerah.

a. Fungsi Pemilukada

Sebagai sebuah aktivitas politik, pemilihan umum pastinya memiliki fungsi-fungsi yang saling berkaitan atau interdependensi.

Adapun fungsi-fungsi dari pemilihan umum itu sendiri adalah:

1) Sebagai sarana legitimasi politik

Fungsi legitimasi ini terutama menjadi kebutuhan pemerintah dan sistem politik. Melalui pemilihan umum kepala daerah, keabsahan pemerintahan daerah yang berkuasa dapat ditegakkan, begitu pula program dan kebijakan yang dihasilkannya. Dengan begitu,

²⁴ Simamora, Janpatar. *Mimbar Hukum*. Volume 23 Nomor 1, Februari 2011. *Eksistensi Pemilukada dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Demokratis*. Medan: Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen.

pemerintah berdasarkan hukum yang disepakati bersama tak hanya memiliki otoritas untuk berkuasa, melainkan juga memberikan sanksi berupa hukuman dan ganjaran bagi siapapun yang melanggarnya. Menurut Ginsberg, fungsi legitimasi politik ini merupakan konsekuensi logis dari pemilihan umum. Ada tiga alasan pemilihan umum dapat menjadi legitimasi politik bagi pemerintahan yang berkuasa. Pertama, melalui pemilihan umum pemerintah dapat meyakinkan atau memperbaharui kesepakatan-kesepakatan politik dengan rakyat. Kedua, melalui pemilihan umum pemerintah dapat pula mempengaruhi perilaku rakyat atau warga negara. Dan ketiga, dalam dunia modern para penguasa dituntut untuk mengadakan kesepakatan dari rakyat ketimbang pemaksaan (*coercion*) untuk mempertahankan legitimasinya. Gramsci (1971) menunjukkan bahwa kesepakatan (*consent*) yang diperoleh melalui hegemoni oleh penguasa ternyata lebih efektif dan bertahan lama sebagai sarana kontrol dan pelestarian legitimasi dan otoritasnya. Ketimbang penggunaan kekerasan dan dominasi.

2) Fungsi perwakilan politik

Fungsi ini terutama menjadi kebutuhan rakyat, baik untuk mengevaluasi maupun mengontrol perilaku pemerintahan dan program serta kebijakan yang dihasilkan. Pemilihan umum dalam kaitan ini merupakan mekanisme demokratis bagi rakyat untuk

menentukan wakil-wakil yang dapat dipercaya yang akan duduk dalam pemerintahan.

- 3) Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai mekanisme bagi pergantian atau sirkulasi elit penguasa tingkat daerah. Keterkaitan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan sirkulasi elit didasarkan pada asumsi bahwa elit berasal dari dan bertugas mewakili masyarakat luas atau rakyat. Secara teoritis, hubungan pemilihan umum dengan sirkulasi elit dapat dijelaskan dengan melihat proses mobilitas kaum elit atau monelit yang menggunakan jalur institusi politik, dan organisasi kemasyarakatan untuk menjadi anggota elit tingkat nasional, yakni sebagai anggota kabinet dan jabatan yang setara. Dalam kaitan itu, pemilihan umum merupakan saran dan jalur langsung untuk mencapai posisi elit penguasa. Dengan begitu diharapkan selama pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat berlangsung pergantian atau sirkulasi elit penguasa tingkat daerah secara kompetitif dan demokratis.

- 4) Sebagai sarana pendidikan politik bagi rakyat

Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat yang bersifat langsung, terbuka dan massal, yang

diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang demokrasi.²⁵

b. Tahapan Pemilukada

Berdasarkan UU nomor 32 Tahun 2004 memenuhi syarat disebut sebagai Pemilukada langsung karena dilaksanakan dengan kegiatan yang melibatkan rakyat sebagai pemilih, memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui partai politik untuk menjadi calon, menjadi penyelenggara, dan mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan.²⁶

Pelaksanaan Pemilukada langsung dilaksanakan dalam 2 tahap yaitu masa persiapan dan tahap pelaksanaan, sebagaimana dikatakan dalam pasal 65 ayat 1.²⁷ Selanjutnya pada ayat 2 pasal yang sama disebutkan bahwa kegiatan – kegiatan yang tercakup dalam masa persiapan adalah :

- a. Pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah mengenai berakhirnya masa jabatan.
- b. Pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah

²⁵ Haris S, 1998, *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru, Sebuah Bunga Rampai*, Yayasan Obor Indonesia dan PPW LIPI Jakarta

²⁶ UU nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

²⁷ Prihatmoko. 2005, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Pustaka Pelajar. Jogjakarta. hlm 210

- c. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah
- d. Pembentukan Panitia pengawas, PPK, PPS dan KPPS
- e. Pembentukan dan pendaftaran pemantau.

Pada masa persiapan keterlibatan rakyat sangat menonjol dalam pembentukan Panitia Pengawas (Panwas), PPK, PPS, dan KPPS serta memiliki akses untuk memantau melalui mekanisme uji publik melalui lembaga – lembaga tersebut. Selanjutnya tahap pelaksanaan terdiri dari 6 kegiatan sesuai pasal 65 ayat 3.²⁸ yaitu :

- a. Penetapan daftar pemilih
- b. Pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah / wakil kepala daerah.
- c. Kampanye
- d. Pemungutan Suara
- e. Penghitungan Suara
- f. Penetapan pasangan calon kepala daerah / wakil kepala daerah terpilih, pengesahan, dan pelantikan.

²⁸ *Ibid*

Dari beberapa tahapan pemilukada diatas maka diambil kesimpulan untuk memilih tiga tahapan guna melakukan penelitian, meliputi;

- a) Tahap Pencalonan
- b) Tahap Kampanye
- c) Dan Hasil

F. Definisi Konseptual

Defenisi konseptual adalah pernyataan yang mengartikan atau memberi makna suatu konsep istilah tertentu. Defenisi konseptual merupakan penggambaran secara umum dan menyeluruh yang menyiratkan maksud dan konsep atau istilah tersebut bersifat *konstitutif* (merupakan defenisi yang tersepakati oleh banyak pihak dan telah dibakukan setidaknya dikamus bahasa), formal dan mempunyai pengertian yang abstrak.²⁹

Defenisi konsepsional yang dipakai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

a) Relasi Sosial

Pengertian Relasi Sosial, Hubungan antar sesama dalam istilah sosiologi disebut relasi atau *relation*. Relasi sosial juga disebut

²⁹ https://www.academia.edu/4498524/BAB_III diakses pada tanggal 13 desember 2015 (03.19)

hubungan sosial yang merupakan hasil dari interaksi (rangkaian tingkah laku) yang sistematis antara dua orang atau lebih. Hubungan dalam relasi sosial merupakan hubungan yang sifatnya timbal balik antar individu yang satu dengan individu yang lain dan saling mempengaruhi.

b) Politik Identitas Etnis

Politik identitas etnis dalam perkembangannya dewasa ini lebih banyak menampilkan diri dalam wacana politik kebudayaan. Dikarenakan politik identitas ialah bagian dari budaya, maka politik identitas etnis ini dikategorikan dalam politik kebudayaan.

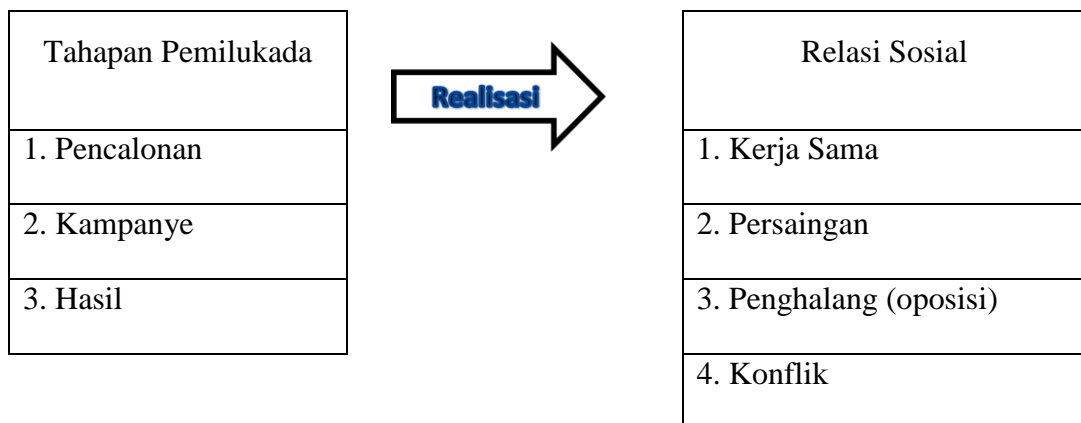
c) Pemilukada

Pemilukada merupakan peran yang menguatkan dan fungsinya sebagai bagian pokok proses demokratisasi di Indonesia. Pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) adalah pemilihan umum yang diselenggarakan ditingkat lokal atau daerah, dalam rangka memilih pemimpin di daerah.

G. Definisi Operasional

Defenisi operasional adalah mendefenisikan variabel secara operasional berdasarkan karakteristik yang di amati ketika melakukan pengukuran secara cermat terhadap suatu objek atau fenomena dengan menggunakan parameter yang jelas.³⁰

Relasi sosial antar etnis dalam pilukada 2013 dilihat dari:



Dari tabel diatas menjelaskan hubungan tahapan pemilu yang direalisasikan dengan relasi sosial. Kemudian dibuktikan dari tahap pencalonan, kampanye, dan hasil adakah pengaruh yang terkait dengan bentuk kerjasama, persaingan, penghalang (oposisi), dan konflik. Berikut ini penulis cantumkan, Lampiran Defenisi Konseptual dan Operasional.

³⁰ https://www.academia.edu/4498524/BAB_III diakses pada tanggal 13 Desember 2015 jam (03.33)

Tabel 1.2
Pertanyaan Wawancara

No.	Defenisi Konseptual	Defenisi Operasional	Instrumen	Pertanyaan
1.	Pencalonan	Kerjasama	1. Alasan pengusung	W. 1
			2. Perhatian terhadap calon	W. 2
		Persaingan	3. Tingkat persaingan calon	W. 3
		Penghalang	4. Penghalang	W. 4
2.	Kampanye	Kerjasama	5. Kerjasama partai	W. 5
			6. Upaya partai meningkatkan kerjasama etnis	W.6
			7. Upaya partai memperoleh dukungan masyarakat dan merangkul etnis	W.7
		Persaingan	8. Tingkat persaingan para pendukung	W. 8
		Penghalang	9. Proses kampanye	W. 9
			10. Upaya partai mengatasi kendala etnis	W.10
		Konflik	11. Tingkat konflik	W. 11
			12. Upaya partai meminimalisir konflik	W.12
3.	Hasil	Kerjasama	13. Kerjasama etnis	W. 13
		Penghalang	14. Penghalang dalam proses akhir	W. 14
		Konflik	15. Konflik sesudah perhitungan	W. 15
			16. Opini oleh masyarakat	W.16

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam suatu penelitian tidak bisa terlepas dari apa yang disebut dengan metodologi, dikarenakan metodologi adalah sebuah sistem penelitian yang penting dan sangat diperlukan untuk membuktikan kebenaran dan dapat dipertanggung jawabkan. Dengan itu perlu

kecermatan dan ketelitian dalam memilih metode yang akan digunakan dalam sebuah penelitian hingga kita akan mendapatkan data yang tepat dan akurat secara ilmiah dari proses ketelitian tersebut dan karenanya akan memudahkan penulis dalam penelitiannya.

Penyusunan skripsi ini penulis menggunakan *case study* yaitu metode penelitian yang menggunakan teori-teori yang di ambil dari literatur buku yang sesuai dengan pembahasan skripsi. Selain itu penulis menggunakan *field research* yaitu metode penelitian dengan menggunakan penelitian lapangan yang sesuai dengan obyek yang penulis pilih.³¹

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif. Pendekatan kualitatif ialah pendekatan yang di dalam usulan penelitian, proses, hipotesis, turun ke lapangan, analisis data dan kesimpulan data sampai dengan penulisannya mempergunakan aspek-aspek kecenderungan, non perhitungan numerik, situasional deskriptif, interview mendalam, analisis isi, bola salju dan story.³²

Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor seperti dikutip oleh Moleong menyebut metode kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari

³¹ <http://digilib.uinsby.ac.id/8920/4/Bab.%20III.pdf> diakses pada tanggal 14 desember 2015 (12.26)

³² Musianto, Lukas S. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan. Volume 4 Nomor 2, September 2002, hal. 123-136. *Perbedaan Pendekatan Kuantitatif dengan Pendekatan Kualitatif dalam Metode Penelitian*. Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Fakultas Komunikasi Universitas Kristen Petra, hal. 125.

orang-orang dan perilaku yang diamati. Data yang diperoleh dalam penelitian ini tidak berupa angka-angka tetapi data yang terkumpul berbentuk kata-kata lisan yang mencakup catatan laporan dan foto-foto.³³

Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan penelitian kualitatif. Berdasarkan data kualitatif yang akan didapatkan dengan melihat dan melakukan perjalanan lapangan atau studi kasus yang dilihat melalui fenomena gejala perpolitikan yang berlandaskan etnis melalui data pada pemilu pada 2013 terhadap relasi politik yang mencalonkan dan oleh masyarakat sebagai peran utama yang menentukan, dengan mengamati dua karakter etnis yang berbeda yaitu Melayu dan Tionghoa dan bagaimana pengaruh perbedaan terhadap masih terjaganya keselarasan yang terjadi di Belitung Barat.

2. Sumber Data

Dalam penelitian adalah yang terpenting perolehan data atau sumber data untuk menjadi bahan pembahasan, maka yang perlu dilakukan oleh penulis ialah bagaimana memperoleh data tersebut secara akurat dan sesuai dengan topik pembahasan. Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data.³⁴

Penelitian ini diperoleh dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud

³³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Karya, 1989, hal.3.

³⁴ http://eprints.walisongo.ac.id/761/4/082411129_Bab3.pdf diakses pada tanggal 15 desember 2015 jam (14.55)

khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.³⁵ Data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian ini dilakukan, data yang dikumpulkan melalui sumber-sumber lain yang tidak tersedia dinamakan data sekunder. Data sekunder yang diperoleh dari penelitian ini yaitu sumber tertulis yang meliputi laporan Jurnal, data halaman web, laporan riset, surat kabar dan peraturan hukum. Yaitu data berupa, jumlah pemilih, jumlah penduduk, deskripsi wilayah, dan jumlah partai pengusung. Hal ini dilakukan untuk mempermudah penulis memperoleh data yang seimbang dan akurat terkait pada pembahasan skripsi ini ialah Politik Etnis dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Belitung Barat tahun 2013.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi mendukung keberhasilan penelitian, dan demi mendapatkan hasil penelitian yang sesuai agar memberikan pemahaman yang tepat bagi peneliti dan pembaca akhirnya. Hal ini berkaitan bagaimana cara

³⁵ http://eprints.walisongo.ac.id/761/4/082411129_Bab3.pdf diakses tanggal 27 Desember 2015 (23.47)

mendapatkannya, mengumpulkan data, siapa sumbernya, dan apa alat yang digunakan.

Ada dua teknik pengumpulan data yang digunakan dalam studi ini yaitu, Wawancara dan Dokumentasi.

a. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap nara sumber atau sumber data. Pengumpulan data dengan memperoleh informasi secara langsung melalui tanya jawab dengan pihak-pihak yang diwawancarai berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan, tetapi tidak menutup kemungkinan muncul pertanyaan lain ketika wawancara sedang berlangsung dalam memperoleh data informasi yang diperlukan. Dengan wawancara akan mampu memperimbangan secara konkrit data yang diterima dan akan mempermudah peneliti mengelola data secara tepat dan akurat. Dengan hal lain perolehan data juga harus didapat dari orang yang berkompeten dengan masalah yang diteliti, seperti sekretaris KPUD, masyarakat, aktivis partai, aktivis mahasiswa dan unsur-unsur terkait lainnya. Wawancara dilakukan dengan partai pengusung dan masyarakat.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati serta mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengamatan yang diteliti. Pendokumentasian dengan sendirinya merupakan kewajiban untuk mendapatkan bukti pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi suatu pengamatan penelitian, organisasi, maupun kegiatan lainnya. Dokumentasi biasanya melalui kamera dengan video, rekaman suara, maupun foto.

Tabel 1.3 Matriks: Teknik Pengumpulan Data

No.	Data Penelitian	Wawancara	Dokumentasi
1.	Proses Pencalonan	✓	✓
2.	Kampanye	✓	✓
3.	Hasil Pemilu	✓	✓
4.	Deskripsi Wilayah Penelitian	-	✓
5.	Jumlah Pemilih	-	✓
6.	Daftar Pengusung Calon	-	✓

4. Teknik Analisis Data

Menurut Nasution (1988) menyatakan analisa telah mulai sejak merumuskandan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung sampai penulisan hasil penelitian. Teknik analisis data yang penulis gunakan ialah deskriptif kualitatif. Dari data yang telah diperoleh baik dari hasil wawancara maupun dokumentasi dianalisis secara deskriptif, dengan memberikan gambaran secara khusus dan teliti dari hasil data yang diperoleh secara kualitatif. Sehingga menemukan jawaban dari perumusan masalah masalah dengan menarik kesimpulan secara deduktif, dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus, dan selanjutnya dipastikan kebenarannya.